(2024), 2 (7): 281–287 Kultura 2985-5624
Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM UPAYA MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DI KELURAHAN MOROKREMBANGAN KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA

The Effectiveness of the Family Hope Program (PKH) in an Effort to Empower the Community in Morokrembangan Village, Krembangan District, Surabaya City

Siti Khotijah[1], Endang Indartuti[2], Dida Rahmadanik[3]
Program Studi Administrasi Negara Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Correspondence
Email: ksiti3394@gmail.com No. Telp:
Submitted: 3 June 2024 Accepted: 13 June 2024 Published: 14 June 2024

ABSTRAK

Masalah kemiskinan hamper terjadi disemua negara termasuk Indonesia. Masalah kemiskinan disuatu negara harus segera diperhatikan oleh pemerintah. Pembentukan program pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu kebijakannya. Program PKH memberikan bantuan tunai bersyarat dengan sasaran untuk mengembangkan kualitas yang dimiliki oleh masyarakat yang berfokus pada kesehatan masyarakat, pendidikan masyarakat dan kesejahteraan sosial di masyarakat. Tujuan penelitian yaitu untuk mengukur suatu efektifitas pada Program Keluarga Harapan (PKH) apakah sudah memenuhi indikator ketepatan sasaran program, ketepatan jumlah bantuan, ketepatan waktu dan dampak adanya program. Berdasarkan temuan penelitian, dapat dikatakan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) masih belum dilaksanakan secara maksimal seperti yang diharapkan di Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan Kota Surabaya.

Kata kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Efektivitas, dan Program Keluarga Harapan (PKH)

ABSTRACT

The problem of poverty almost occurs in all countries, including Indonesia. The problem of poverty in a country must be immediately paid attention to by the government. The establishment of a community empowerment program by the government through the Family Hope Program (PKH) is one of its policies. The PKH program provides conditional cash assistance with the goal of developing the quality of the community that focuses on public health, community education and social welfare in the community. The purpose of the study is to measure the effectiveness of the Family Hope Program (PKH) whether it has met the indicators of the accuracy of the program's goals, the accuracy of the amount of assistance, the timeliness and the impact of the program. Based on the findings of the research, it can be said that the Family Hope Program (PKH) is still not implemented optimally as expected in Morokrembangan Village, Krembangan District, Surabaya City.

Keywords: *Community Empowerment, Effectiveness, and Family Hope Program (PKH)*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia yaitu negara yang tergolong padat penduduk dan banyak wilayah geografis yang luas. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk di Indonesia saat ini sekitar 278 juta jiwa. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa terdapat 9,36% penduduk Indonesia terjebak digaris kemiskinan. Salah satu indikator yang penting untuk melihat pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah masalah ekonomi dan kemiskinan. Masalah kemiskinan di Indonesia masih menjadi masalah sosial yang menjadi pusat perhatian di Indonesia, kemiskinan ini dapat digambarkan dengan belum tercukupinya sumber daya, baik itu uang, pendidikan, kesehatan, atau akses ke layanan dasar seperti air bersih. Hal ini menyebabkan masyarakat mengalami hambatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan pangan, pakaian, dan hunian yang layak (Badan Pusat Statistik, 2023).

Kemiskinan disebuah negara juga dapat membuat permasalahan lain seperti anak jalanan, kriminalitas, pengangguran, kekerasan rumah tangga dan lain - lain. Permasalahan kemiskinan di Indonesia masih memerlukan penanganan khusus untuk menghindari kemungkinan terburuk dimasa depan dan menghambat pembangunan suatu bangsa. Pemecahan masalah ini harus dilakukan secara mendasar dan terorganisir dengan baik. Berikut adalah presentase angka kemiskinan di Indonesia berdasarkan kepulauan.

Pulau	Persentase Penduduk Miskin (%)			Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumatera	7,97	10,33	9,27	2,20	3,47	5,67
Jawa	7,40	11,81	8,79	7,85	5,77	13,62
Bali dan Nusa Tenggara	8,50	17,73	13,29	0,65	1,44	2,09
Kalimantan	4,45	6,88	5,67	0,38	0,59	0,97
Sulawesi	5,87	13,16	10,08	0,50	1,54	2,04
Maluku dan Papua	6,13	26,73	19,68	0,16	1,35	1,51
Indonesia	**7,29**	**12,22**	**9,36**	**11,74**	**14,16**	**25,90**

Gambar 1. 1Presentase dan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Pulau, Maret 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pulau jawa tergolong pulau dengan penduduk miskin terbanyak di Indonesia dengan total penduduk miskin sejumlah 13,62 juta orang dan jauh jika dibandingkan dengan pulau lainnya. Hingga maret tahun 2021 dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS) diketahui bahwa penduduk provinsi di Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang termasuk penduduk miskin di pulau Jawa dengan total presentase mencapai 16,6% dari total penduduk miskin nasional.

Upaya penanggulangan yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan mulai dari menyediakan kebutuhan pangan, penyediaan akses layanan kesehatan dan penyediaan pendidikan gratis serta pembanguna infrastruktur. Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu cara pemerintah melakukan pembangunan nilai-nilai masyarakat dalam mengelola pikiran dengan sumberdaya yang dimiliki atau potensi guna menciptakan kemampuan dan kemandirian secara ekonomi. Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya dalam memberdayakan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup sebagaian masyarakat yang masih terjebak dalam keterbelakangan kesmiskinan. Dengan adanya dorongan perubahan yang dilakukan oleh pemerintah secara mendasar harus didukung oleh partisipasi masyarakat yang lebih besar agar program berjalan sesuai dengan rencana awal dan berjalan dengan baik hingga program selesai dilaksanakan.

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) di 48 kabupaten/kota dan 7 provinsi sejak tahun 2007. Dengan harapan program ini akan berkelanjutan, lokasi percontohan adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Gorontalo (Kementrian Sosial Republik Indonesia, 2019). Dengan memberikan akses kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap layanan kesehatan masyarakat, kesejahteraan sosial, dan pendidikan, PKH berupaya mengurangi beban keuangan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga berpenghasilan rendah dan meningkatkan kehidupan sosial mereka, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 1 Pasal 2 Tahun 2018.

Program bantuan PKH merupakan bantuan berupa uang tunai yang sasaran penerima bantuan berdasarkan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya, yaitu keluarga miskin atau Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan ketentuan pemenuhan kewajiban

sebagai penerima peserta PKH. Kelurahan Morokrembangan merupakan salah satu Kelurahan yang mendapatkan bantuan dana PKH yang terdapat 9 Rukun Warga (RW) dan 99 Rukun Tetangga (RT), namun peneliti akan mengambil 1 perwakilan dari setiap Rukun Warga (RW) yang tergolong kriteria penerima Program Keluarga Harapan (PKH. Mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai pedagang kaki lima dan sebagaian pegawai. Kepala Rumah Tangga bekerja sebagai ojek online, tukang becak, pemborong barang bekas (Rongsokan), kuli bangunan, bahkan para lansia masih banyak yang bekerja untuk mencari makan Jika dilihat dari pekerjaannya, dalam segi ekonomi untuk mencukupi kebutuhan pokok mereka disetiap harinya masih dikatakan belum cukup.

Hal ini membutikkan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan Morokrembangan dapat dikatakan masih rendah. Penelitian ini bertjuan untuk mengukur keefektivitasan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya memberdayakan masyarakat di Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya.

LANDASAN TEORI

Pemberdayaan Masyarakat

Menurut pedapat dari (Noor, 2011) pemberdayaan masyarakat ialah suatu konsep atau cara pembangunan yang meliputi nilai-nilai masyarakat untuk pembangunan yang bersifat people centered dan participatory. Terdapat 3 (tiga) aspek yang dapat dikaji dalam upaya pemberdayaan masyarakat yaitu *Enabling, Empowering dan Protecting. Enabling* adalah upaya mengembangan potensi masyarakat, *Empowering* adalah upaya memberdayakan masyarakat dengan cara memperkuat potensi yang masyarakat miliki dan *Protecting* adalah upaya memberdayakan masyarakat dengan cara mengutamakan kepentingan masyarakat lemah.

Konsep Efektivitas

Efektivitas adalah hasil tujuan dari adanya program dengan cara penggunaan sumber daya yang dimiliki dengan berdaya guna atau efektif, dilihat dari sudut pandang masukkan program (input), proses, maupun hasil (output). Dapat disimpulkan bahwa suatu program dapat dikatakan bejalan dengan efisien jika program dikerjakan dengan maksimal agar memberikan hasil yang baik dan tidak ada pemborosan waktu, materi dan energi. Sedangkan dapat dikatakan efektif apabila program tersebut dilakukan dengan benar atau menghasilkan sesuai dengan hasil yang direncanakan (Machfiroh, 2015). Menurut pendapat (Muliana, 2020) terdapat beberapa indikator untuk mengukur tingkat kefeiktivitasan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu:

1. Ketepatan Sasaran
   Menurut penelitian yang dilakukan oleh Budiani, dalam pengukuran indikator ketepatan sasaran di Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dikatakan berhasil jika sasaran penerima PKH diterima sesuai yang direncanakan sebelumnya atau sesuai dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dalam data DTKS yang dikelola Kementrian Sosial (Kemensos) sasaran dari Program Keluarga Harapan (PKH) ialah keluarga miskin atau kurang mampu. Data tersebut dapat diakses oleh masyarakat secara online (Budiani, 2009a).

2. Ketepatan Jumlah Bantuan
   Ketepatan jumlah bantuan merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi efektivitas program PKH. Menurut pendapat (Juliani, 2023) ketepatan jumlah bantuan adalah nominal yang diterima oleh peserta penerima PKH harus sesuai dengan jumlah nominal awal yan ditetapkan pemerintah dan jumlah nominal yang diterima tidak ada kekurangan ataupun

nominal yang diterima tidak kelebihan hingga kegiatan terlaksana dengan baik. Menurut Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 9/3/BS.02.01/2/2023 tentang Indeks dan Faktor Penimbang Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2023:

No.	Faktor Penimbang	Indeks Bantuan (Rp) / Tahun
1	Kategori Ibu Hamil atau Nifas	Rp. 3.000.000
2	Kategori Anak Usia 0 s.d. 6 Tahun	Rp. 3.000.000
3	Kategori Pendidikan Anak SD/Sederajat	Rp. 900.000
4	Kategori Pendidikan Anak SMP/Sederajat	Rp. 1.500.000
5	Kategori Pendidikan Anak SMA/Sederajat	Rp. 2.000.000
6	Kategori Penyandang Disabilitas Berat	Rp. 2.400.000
7	Kategori Lanjut Usia	Rp. 2.400.000

Sumber : Dinas Sosial Kota Surabaya, 2023

Gambar 1: Indeks dan Faktor Penimbang Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) 2023

3. Ketepatan Waktu
   Indiator ketepatan sasaran dalam suatu program dapat dikatakan berhasil apabila pelaksanaan program dan kemampuan atau prinsip dalam melakukannya telah sesuai dengan perencanaan waktu yang teah ditetapkan sebelumnya dan tidak ada keterlambatan oleh sebab itu kinerja dalam melaksanakan suatu program harus dilaksanaan dengan disiplin dan tanggung jawab (Kamariani, 2024). Berikut jadwal penerimaan bantuan program PKH secara keseluruhan:
   a. Tahap 1: Januari – Maret;
   b. Tahap 2: April – Juni;
   c. Tahap 3: Juli – September; dan
   d. Tahap 4: Oktober – Desember

4. Dampak Adanya Program
   Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Setyawardani tentang dampak dari adanya program PKH, tujuan utama adanya program PKH adalah untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan mensejahterakan penerima bantuan melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan (Setyawardani, 2020). Perubahan nyata adalah hasil dari penerapan program yang signifikan, berpenngaruh, dan memiliki dampak nyata atau perbedaan dalam keadaan sekarang dan kondisi sebelumnya.

Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memperlihatkan situasi serba kekurangan. Sumber daya manusia (SDM) yang rendah, kurangnya kesempatan kerja, sikap pribadi, dan kebijakan pembangunan adalah penyebab utama kemiskinan di Indonesia. Adapun strategi pemerintah untuk menurunkan ngka kemiskinan diIndonesia yaitu (1) memberikan perlindungan untu keluarga dan kelompok masyarakat miskin, dan (2) memberdayakan masyarakat yang mengalami keterbelakangan

kemiskinan parah serta mengantisipasi adanya kemiskinan baru (Kemenkeu Republik Indonesia Ditjen Pembendaharaan Kanwil. DJPb Provinsi Sulawesi Tengah, 2022).
Program Keluarga Harapan (PKH) adalah inisiatif pemerintah untuk menurunkan tingkat kemiskinan dengan memberikan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) atau Keluarga Sangat Miskin (KSM) sebagaimana dinilai oleh peraturan saat ini dukungan moneter langsung. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk meningkatkan taraf hidup keluarga berpenghasilan rendah dengan meningkatkan kesejahteraan sosial, kesehatan, dan program pendidikan dan dengan mendorong Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk mengadopsi gaya hidup sehat untuk mencapai kemandirian ekonomi dan sosial jangka panjang.

METODE PENELITIAN

Metodologi kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini, dan sumber data primer dikumpulkan melalui survei, wawancara, dan observasi. Untuk data sekunder didapatkan melalui laporan, jurnal-jurnal, tesis serta arsip dokumen yang diperoleh dari Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya. Sedangkan strategi reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan adalah metode analisis data yang digunakan (Helaluddin dan Wijaya Hengki, 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasaran hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya dalam wawancara dengan Kepala Kelurahan Morokrembagan, Koordinator PKH, Pendamping PKH dan 8 (delapan) informan dari perwakilan peserta penerima Program Keluarga Harapan (PKH) per Rukun Warga (RW). Dalam mengukur indikator efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) menggunakan 4 (empat) indikator menurut (Muliana, 2020) diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Ketepatan Sasaran

Menurut (Budiani, 2009b) menguraikan bagaimana tujuan program akurat bila dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk menentukan efektivitasnya. Kekhususan sasaran ditentukan oleh Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No. 1 Tahun 2018 Pasal 5 ayat 2, yang menyatakan bahwa bantuan akan diberikan sesuai dengan persyaratan untuk anak balita, persyaratan pendidikan untuk anak SD/SMP/SMA Sederajat dan ayat 3 (tiga), yang menetapkan persyaratan kesejahteraan sosial bagi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan berusia 60 tahun atau lebih (lansia).

Ketepatan sasaran dari Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya memberdayakan masyarakat di Kelurahan Morokrembangan Kecataman Krembangan Kota Surabaya dalam proses implementasi yang dijalankan oleh koordinator serta petugas pendamping dalam hal pendampingan PKH telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan walaupun belum bisa dikatakan efektif dikarenakan sasaran peserta penerima PKH belum sesuai kategori penerima PKH. Seperti peserta penerima ibu Budiarti dan bapak Mujiono yang dikategorikan sebagai penerima PKH lansia tetapi umur beliau belum sesuai dengan kategori peserta penerima PKH. Adapun peserta penerima program bantuan yang namanya terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai penerima PKH akan tetapi bantuan dana PKH tidak diterima. Berdasarkan indikator efektivitas program maka efektivitas sasaran bantuan di Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kotas Surabaya dapat disimpulkan bahwa indikator sasaran bantuan belum efektif.

2. Ketepatan Jumlah Bantuan

Berdasarkan hasil penelitian dengan informan 8 (delapan) penerima PKH di Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya dapat dikatakan sudah efektif dikarenakan jumlah dana bantuan yang diterima sesuai dengan yang ditentukan oleh

Kementrian Sosial. Jumlah bantuan untuk kategori penerima anak balita Rp. 3.000.000 pertahun. Untuk kategori penerima PKH anak sekolah SMP/Sederajat Rp. 1.500.000 pertahun dan untuk kategori Lanjut Usia (lansia) Rp. 2.400.000 pertahun

3. Ketepatan Waktu Penerimaan

Menurut Peraturan Keuangan Negara Rupublik Indonesia tentang bansos PKH tahun 2023 tentang periode penerimaan penyaluran dana bantuan PKH melalui kantor pos dilakukan menjadi 4 (empat) tahap dalam satu tahun atau penyaluran dana bantuan dilakukan per 3 (tiga) bulan sekali yaitu pada bulan Januari, April, Juli dan Oktober. Sedangkan periode waktu penerimaan dana bantuan melalui ATM BNI dilakukan menjadi 6 (enam) tahap dalam satu tahun atau penyaluran dana bantuan dilakukan per 2 (dua) bulan sekali yaitu pada bulan Januari, Maret, Mei, Juli, September, dan November. Ketapatan waktu pencairan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya sudah tepat waktu atau bisa dikatakan efektif sesuai dengan peraturan Kementrian Sosial dan jika waktu pencairan dana bantuan sudah disalurkan peran pendamping PKH akan mengabarkan kepada peserta PKH by phone.

4. Dampak Adanya Program

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh (Noor, 2011) tujuan dari adanya pemberdayaan masyarakat melalui Program Pemberdayaan Masyarakat (PKH) adalah untuk menfasilitasi para peserta penerima PKH dalam merencanakan dan mengelola potensi yang dimiliki guna menciptakan kemandirian secara ekonomi dan berkelajutan. Dalam hal ini, ini menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki dampak efektif di Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, karena dukungan yang diterima oleh peserta penerima manfaat PKH dimanfaatkan dengan tepat sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No. 1 Tahun 2018. Berdasarkan informan peserta penerima PKH Lanjut Usia (Lansia) yang diterima oleh ibu Budiarti, bapak Mujiono, bapak Kastilam dan ibu Limbuk. Bantuan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari guna mensejahterakan kehidupan dimasa tua dan sisa dana bantuan dipergunakan untuk perputaran modal usaha. Adapun penerima dana bantuan PKH anak sekolah kategori pendidikan yang diterima oleh ibu Sanimah, bantuan dipergunakan untuk memenuhi akses kebutuhan sekolah seperti membayar Surat Persetujuan Pembayaran (SPP), pembelian alat tulis sebagai penunjang sarana pendidikan dan perlengkapan sekolah lainnya. Sedangkan dana bantuan kategori PKH anak balita yang diterima oleh ibu Sanimah, ibu Zumrotul Anisa dan ibu Rini dipergunakan untuk meningkatkan akses kesehatan balita seperti memenuhi kebutuhan gizi balita serta penunjang lainnya dan sebagai tabungan anak untuk pendidikan selanjutnya. Dalam hal ini, bantuan pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menanggulangi kemiskinan di Kelurahan Morokrembangan sudah berjalan efektif sesuai dengan peraturan yang ada. dilihat dari perubahan perilaku penerima manfaat, kemandirian dalam hal akses pendidikan ataupun kesehatan dan kemandirian secara ekonomi seperti perputaran dana bantuan yang diterima sebagai tambahan modal usaha.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai keefektivitasan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya memberdayakan masyarakat di Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya dapat disimpulkan bahwa dari ke empat indikator untuk mengukur keefektivitasan program PKH seperti (1) Ketepatan sasaran, (2) Ketepatan jumlah bantuan (3) Ketepatan waktu dan (4) Dampak adanya program, masih terdapat satu indikator yang masih belum bisa dikatakan efektif yaitu ketepatan sasaran. Dikarenakan masih terdapat beberapa informan yang tidak termasuk kategori penerima PKH lansia tetapi mendapatkan bantuan program PKH lansia dan masih terdapat nama penerima

PKH yang terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan tetapi bantuan sudah tidak diterimanya. Hal ini dalam indikator ketepatan sasaran di Kelurahan Morokrembangan dinilai masih belum efektif.

SARAN

Dalam penelitian ini adapun saran yang diberikan oleh peneliti yaitu untuk pihak Pemerintah untuk melakukan pembaharuan data setiap saat dan dilakukan koordinasi yang baik dengan pihak Kelurahan Morokrembangan, koordinator PKH, dan pendamping PKH terhadap peserta penerima PKH agar program berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Sedangkan untuk masyarakat seharusnya lebih aktif lagi dalam mencari tahu tentang bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah dengan berkoordinasi langsung dengan RT/RW setempat mengenai bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2023). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*.

Budiani, N. W. (2009a). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Dan Sosial INPUT*, *2 N0 1*.

Budiani, N. W. (2009b). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Ekonomi Dan Sosial*, *2 No 1*.

Helaluddin dan Wijaya Hengki. (2019). Analisis Data Kualitatif Sebuah Tijauan Teori dan Praktik. In *Sekolah Tinggi Theologia Jaffray* (Pertama, p. 148).

Juliani, R. dkk. (2023). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Dulupi. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *2 No 8*, 3379.

Kamariani, B. D. dkk. (2024). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Journal of Administrative and Sosial Scie*, *5 No.01*, 208.

Kemenkeu Republik Indonesia Ditjen Pembendaharaan Kanwil. DJPb Provinsi Sulawesi Tengah. (2022). *Memahami Kembali Strategi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*.

Kementrian Sosial Republik Indonesia. (2019). *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*.

Machfiroh, A. (2015). Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM–MP) di Kota Palu. *Katalogis*, *3*, 179–185.

Muliana, S. dkk. (2020). Efektivitas dan Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentaskan Kemiskinan di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala. *Jurnal Syntax Transformation*, *1*(10), 749–758. https://doi.org/10.46799/jst.v1i10.163

Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Ilmiah CIVIS*, *1*, 87–99.

Setyawardani, D. T. R. dkk. (2020). Dampak Bantuan PKH Terhadap Masyarakat Miskin di Kelurahan Bumi Nyiur Kecamatan Wanea Kota Manado. *Jurnal Holistik, 13 No 2*, 11.